

## PENGARUH *BELT AND ROAD INITIATIVE* (BRI) CHINA TERHADAP EKONOMI VIETNAM TAHUN 2017-2018

Lutfriana Nur Hamidah  
Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
Email : [Lutviananur@gmail.com](mailto:Lutviananur@gmail.com)

### ABSTRAK

*Belt Road Initiative (BRI) atau dengan nama lain One Belt One Road (OBOR) merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh China. China sebagai negara penggagas adanya BRI ingin melebarkan daerah kekuasaan ke negara-negara tetangga yang berdekatan, salah satunya adalah Vietnam. Vietnam sebagai salah satu negara yang berada di Kawasan Asia Tenggara berusaha untuk membuktikan apresiasi negaranya terhadap adanya BRI yang diinisiasi oleh China. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh proyek Belt and Road Initiative (BRI) China terhadap ekonomi Vietnam tahun 2017-2018. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori geoekonomi dan diplomasi bilateral. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder yang berasal dari berita, website, dan penelitian terdahulu yang diambil dengan Teknik pengumpulan data library research. Hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, BRI telah memberikan pengaruh terhadap geoekonomi China dan Vietnam periode 2017-2018. Dimana terdapat kenaikan pada kerjasama sektor perdagangan, energi, dan pariwisata. BRI juga telah memfasilitasi pembangunan taman industri Long Jiang. Sehingga BRI memiliki peran penting dalam kerjasama ekonomi China dan Vietnam.*

**Kata kunci:** *Belt and Road Initiative, China, Geoekonomi, Kerja Sama Bilateral, Vietnam*

### ABSTRACT

*Belt Road Initiative (BRI) or otherwise known as One Belt One Road (OBOR) is one of the policies issued by China. China as the initiator of BRI wants to expand its territory to neighboring countries, one of which is Vietnam. Vietnam as one of the countries in the Southeast Asia region is trying to prove its appreciation for the BRI initiated by China. The purpose of this study is to determine the influence of China's Belt and Road Initiative (BRI) project on Vietnam's economy in 2017-2018. In this study, the author uses geoeconomic theory and bilateral diplomacy. The research method used is a qualitative research method with secondary data sources from news, websites, and previous research taken using library research data collection techniques. The results of the analysis conducted by the author, BRI has influenced the geoeconomics of China and Vietnam in the 2017-2018 period. Where there is an increase in cooperation in the trade, energy, and tourism sectors. BRI has also facilitated the construction of the Long Jiang industrial park. So BRI has an important role in the economic cooperation of China and Vietnam.*

**Keywords:** *Belt and Road Initiative, Bilateral Cooperation, China, Geoeconomics, Vietnam*

### PENDAHULUAN

*Belt Road Initiative (BRI) atau dengan nama lain One Belt One Road (OBOR) merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh China. Alasan utama diadakannya BRI yaitu memperkuat kedudukan China dalam dunia perdagangan dan menjadi kekuatan baru selain Amerika Serikat (Anggraeni dkk., 2021). Salah satu kawasan yang masuk dalam BRI adalah kawasan Asia terutama Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan melalui kerja sama antara negara-negara di Asia Tenggara dengan China yang disebut ACFTA. ACFTA adalah singkatan dari ASEAN China Free Trade Area. Sejak tahun 2010 perjanjian ACFTA sudah mulai diterapkan melalui perjanjian yang telah ditandatangani bersama (Building the*

ASEAN Community: ASEAN-China Free Trade Area Building Strong Economic Partnership, 2015). China menjadi negara yang mulai memiliki kekuatan ekonomi hingga berpengaruh dalam sistem moneter internasional dan dikatakan sebagai negara emerging power. Pembangunan ekonomi dalam jalur sutra yang telah lama tidak dilalui, kembali diinisiasi oleh China dengan bekerja sama dengan Asia Tenggara. Dalam sudut pandang Geoekonomi, kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara dengan China merupakan salah satu tindakan China dalam mempengaruhi perekonomian dunia terutama di kawasan Asia Tenggara. Geoekonomi adalah pandangan mengenai ruang lingkup budaya, wilayah, serta sumber daya dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara berkelanjutan (Anggraeni dkk., 2021).

China membuka jalur perdagangan luar negeri yang sebagian besarnya melalui Laut China Selatan, Samudra Hindia, dan Selat Malaka. Ketiga jalur tersebut saling berkaitan dan menjadi jalur penting bagi kawasan Asia Tenggara. Namun bagi China jalur yang ditempuh melalui laut membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga China menjalin kerja sama untuk merealisasikan perdagangan melalui jalur darat. Proyek jalur darat akan difokuskan dalam kawasan Asia dan Eropa (Agustian dkk., 2021). Dalam mencapai kepentingannya, China menggunakan Geoekonomi dengan menggunakan pemetaan geografis jalur perdagangan dalam mewujudkan peluangnya dan memperkuat ekonomi. *Belt and Road Initiative* telah dirancang sejak tahun 2013, namun sebelum perancangan tersebut yaitu tahun 2012, China mengalami penurunan ekonomi dan ekspor. Faktor utama yang menjadi penyebab yaitu pelemahan pasar dalam negeri yaitu China dan pelemahan pasar luar negeri. Bahkan angka pertumbuhan pada tahun 2012 hanya mencapai 7,6 %, itu merupakan angka terendah dalam sejarah China sejak tahun 1999. Maka melalui upaya diplomatik Xin Jinping, Presiden China, tahun 2013 melakukan kunjungan melalui pertemuan negara-negara yaitu APEC, ASEAN, dan *East Asia Summit* (EAS) untuk memperkenalkan kebijakan ‘*One Belt, One Road*’ (Anam & Ristiyani, 2018). Hal tersebut menandakan bahwa China mulai membentuk kepentingan ekonomi dan keamanan bersama pada wilayah Asia terutama Asia Tenggara. Salah satu investasi terbesar China melalui *One Belt One Road* adalah mendanai *Asia Infrastructure Investment Bank* (AIIB). Investasi yang dilakukan China disampaikan melalui pertemuan APEC pada tahun 2013 (Cox dkk., 2018).

Berdasarkan penelitian Gerald Theodorus Lumban Toruan, 2021 menjelaskan bahwa China tengah memperkuat dan memberikan bantuan investasi ke negara Asia Tenggara salah satunya Indonesia (Lumban Toruan, 2021). Untuk masuk ke Asia Tenggara, China sangat memerlukan mitra strategis yang menjadi semacam penghubung. yang secara Geografis merupakan negara di kawasan Asia tenggara namun berdekatan dengan China, seperti Vietnam. Vietnam mejadi “gerbang alternatif” yang dapat menghubungkan China dengan Asia Tenggara secara fisik, sebab Vietnam merupakan satu satunya negara di Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan China baik di darat maupun di laut. jarak keduanya yang amat dekat memungkinkan mobilisasi komoditas china ke Asia Tenggara berlangsung cepat dan efisien (Kurniawan, 2021).

Vietnam memerlukan setidaknya 605 miliar USD untuk mengembangkan kebutuhan infrastruktur (2016-2040) dari beragam jenis dan sektor, mulai dari Jalan bebas hambatan, jalur kereta api, bandara, pelabuhan, hingga instalasi listrik, air dan telekomunikasi, dengan nilai Current Investment yang berjumlah 503 Miliar USD, Vietnam perlu mencari alternative dana, mereka memerlukan setidaknya 102 miliar USD untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Infrastruktur negara mereka (Global Infrastructure Outlook, 2017:150).

sementara China yang butuh mitra strategis memiliki dana segar tersebut, melalui BRI keduanya sama-sama akan memperoleh keuntungan yang bersifat *win-win cooperation*, China akan “mendapatkan” Asia Tenggara, sementara Vietnam akan memperoleh dana cepat serta pengembangan Infrastruktur (Iriyanto, 2024). Hubungan China dengan Vietnam berada pada puncak kejayaan di tahun 2017. Pada tahun tersebut kedua negara bersepakat untuk melakukan penandatanganan MoU yang di dalamnya menjelaskan tentang proyeksi-proyeksi kerja sama ekonomi. Penelitian ini menjadi menarik karena hubungan antara kedua negara terkait sempat merenggang, namun kedua negara kembali menjalin hubungan baik. Vietnam sebagai salah satu negara yang berada di Kawasan Asia Tenggara berusaha untuk membuktikan apresiasi negaranya terhadap adanya BRI yang diinisiasi oleh China, mengingat bahwa negara Vietnam masih tergolong dalam negara berkembang. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk melihat lebih dalam lagi mengenai pengaruh pengaruh proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) China terhadap ekonomi Vietnam tahun 2017-2018.

## KERANGKA ANALISIS

### 1. Geoekonomi

Konsep geoekonomi belakangan ini menjadi suatu topik yang banyak dipakai bagi para akademisi dan juga pejabat pembuat kebijakan sebagai suatu orientasi opini. Dalam pengamatan Mattlin dan Wigell (2016), yang menyatakan bahwa banyak analis yang menggunakan istilah geoekonomi sebagai suatu kunci tanpa mendefinisikan artinya dengan jelas. Kamus Webster memberikan definisi dari geoekonomi sebagai berikut “Kombinasi faktor ekonomi dan geografis yang berkaitan dengan perdagangan internasional”. Blackwill dan Harris (2016) dalam bukunya mendefinisikan “geoekonomi” sebagai: “Penggunaan instrumen ekonomi untuk mempromosikan dan membela kepentingan nasional, dan untuk menghasilkan hasil geopolitik yang bermanfaat; dan dampak tindakan ekonomi negara lain terhadap tujuan geopolitik suatu negara” (Kennedy, 2022).

Istilah geoekonomi pertama kali diciptakan oleh ahli strategi AS Edward Luttwak pada tahun 1990, ketika khawatir bahwa Jepang akan menantang keunggulan globalnya dengan ekonomi daripada cara militer. Luttwak (1990) dalam artikelnya menggunakan istilah geoekonomi untuk menggambarkan sistem pasca Perang Dingin, merupakan arena persaingan utama antar negara yang mementingkan ekonomi daripada militer. Luttwak (1993) lebih lanjut mengelaborasi ideidenya dalam sebuah buku yang diterbitkan tiga tahun kemudian. Dengan berakhirnya ancaman Soviet ke Eropa dan Amerika Serikat, tidak dapat dibayangkan bakal terjadi perang besar atau konfrontasi militer dalam waktu dekat (Wigell, 2018). Apa yang sekarang disebut strategi geoekonomi seperti yang dilakukan oleh semua kekuatan besar di masa lalu, telah memberikan hasil positif bagi banyak negara yang telah memanfaatkan ekonomi dan keamanan dari strategi ini. Geoekonomi menyediakan “perangkat” yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengejar tujuan yang berbeda dari setiap negara (Golley, 2016).

Konsep Geoekonomi menurut Lutwakk masih sangat relevan terjadi pada masa sekarang. Lutwakk mengidentifikasi lima tren global baru yang bermanifestasi di

perempatan politik, ekonomi, teknologi, dan masyarakat yang memunculkan tatanan baru ini, yaitu (Kennedy, 2022) :

- a. Persaingan strategi antara Amerika dan China, dipicu oleh munculnya China sebagai kekuatan yang sangat besar, dimana model tatanan politik dan organisasi ekonominya sangat berbeda dengan Amerika Serikat.
- b. Adanya kebijakan pemerintah domestik China dan strategi serta pengaruh internasionalnya, termasuk The Belt and Road Initiative -nya.
- c. Perluasan masalah keamanan nasional yang mencakup banyak domain, termasuk dalam perdagangan dan investasi internasional.
- d. Melemahnya tatanan berbasis aturan yang muncul di bawah kepemimpinan Amerika pada periode pascaperang, baik karena tantangan yang ditimbulkan oleh China dan negara-negara non-Barat lainnya, maupun tantangan dari legitimasi di mata publik Barat.
- e. Tingkat saling ketergantungan global yang sangat tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk arus manusia, pengetahuan, barang dan modal, serta konektivitas di ruang siber.

Dalam praktiknya, suatu negara memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan sosial diharapkan akan terus meningkat. Agar dapat memberikan kesejahteraan sosial maka pembangunan haruslah mengarah pada bagaimana terciptanya rasa aman dan nyaman diantara para individu maupun kelompok dalam menjalankan kegiatannya, sehingga mereka dapat meningkatkan utilitasnya secara maksimal. Untuk menciptakan rasa aman maka perlu pertahanan untuk mengeliminir ancaman yang dihadapi suatu negara. Membangun pertahanan membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah melalui anggaran pertahanan.

Teori geoekonomi pada penelitian ini akan digunakan untuk mengkaji relasi kuasa atau *power sharing* yang digunakan oleh China terhadap negara-negara yang berada di Kawasan Asia Tenggara. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada negara Vietnam. Dengan kata lain, teori ini digunakan untuk melihat bagaimana China dalam strateginya untuk membangun kekuatan kuasa di Vietnam.

## **2. Teori Diplomasi Bilateral**

Pada teori sebelumnya yaitu teori Geoekonomi, telah disebutkan bahwa suatu negara memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakatnya. Mensukseskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat merupakan salah satu kepentingan nasional yang harus dicapai oleh suatu negara. Kepentingan nasional merupakan suatu tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang bisa dicapai sebuah negara melalui upaya diplomasi.

Menurut Bolewski (2007:15), diplomasi adalah praktik sebagai seni dan kerajinan dalam berkomunikasi dan pertukaran antara negara-negara yang bertindak melalui perwakilan mereka untuk kepentingan nasional (seperti politik, ekonomi, ilmiah, sosial dan lainnya) dengan cara yang damai. Dalam buku *Dictionary of Diplomacy* mengartikan bahwa diplomasi adalah komunikasi antar negara yang memungkinkan memiliki hubungan yang bersifat regular atau kompleks (Berridge, 2015). Selaras dengan pengertian sebelumnya, menurut Jonsson dan Hall (2005:15) diplomasi adalah proses dan hubungan yang memiliki

kontribusi di sebuah perbedaan dalam ruang politik. Dalam praktiknya, diplomasi terbagi menjadi beberapa bagian salah satunya ialah diplomasi bilateral.

Diplomasi bilateral merupakan suatu kegiatan negosiasi dan hubungan langsung antara dua negara yang melibatkan hubungan politik dan budaya kedua negara. Hubungan kerja sama merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan internasional, yang dapat digapai dengan adanya diplomasi. Diplomasi menjadi sangat penting dalam suatu negara, terutama dalam menjalankan hubungan antar negara. Dalam hubungan dengan negara lain, diplomasi berada pada tingkat paling awal sebelum perjanjian hubungan bilateral tersebut disepakati. Pelaksanaan hubungan bilateral antar negara secara otomatis juga menggunakan diplomasi bilateral di dalamnya.

Kerja sama bilateral merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan diplomasi yang dilakukan oleh dua negara untuk mencapai suatu tujuan bersama dan di dalamnya terdapat hubungan timbal balik. Kerja sama bilateral adalah salah satu bentuk kerja sama dalam dunia internasional yang di dalamnya melibatkan dua negara. Kedua negara tersebut bekerja sama untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara dan juga mencapai tujuan bersama dalam kerja sama bilateral. Kerja sama bilateral biasanya ditandai dengan adanya penandatanganan perjanjian, pertukaran duta besar, dan kunjungan kenegaraan. Kerja sama bilateral adalah suatu kerja sama politik, budaya, pendidikan dan ekonomi antar dua negara. Kerja sama bilateral merupakan alternatif dari kerja sama multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri (*freewill*) (Rudy, 2002: 127).

Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara. Dalam proses hubungan bilateral di tentukan tiga motif, yaitu: memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Perwita A. A., 2011). Diplomasi bilateral atau kata lainnya “bilateralisme” merupakan pola hubungan politik dan budaya yang mengacu pada keterlibatan dua negara (Berridge, 2015). Pola hubungan bilateral antar negara biasanya diperlihatkan dengan adanya keberadaan dan fungsi perwakilan suatu negara di negara lain.

Pola hubungan dalam diplomasi bilateral menggunakan prinsip hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Pola diplomasi ini disebut sebagai pola diplomasi yang paling efektif. Hal ini dikarenakan hanya melibatkan dua negara saja di dalamnya, maka lebih mudah untuk mengatur kesepakatan demi mencapai kepentingan nasional masing-masing negara. Namun, sisi negatif dari pola diplomasi ini adalah ada kemungkinan penyembunyian suatu info terhadap negara lain. Selain itu juga memungkinkan adanya negara yang memiliki power lebih lah yang lebih dominan (Djelantik, 2016). Untuk mencapai hubungan bilateral yang maksimal, suatu negara perlu untuk melakukan diplomasi. Tujuan dilakukannya diplomasi adalah untuk mengamankan kepentingan nasional suatu negara (S.L.Roy, 2016).

Dalam hubungan bilateral antara China dengan Vietnam, kedua pemimpin negara tersebut menggunakan diplomasi bilateral dalam mempererat hubungan persahabatan. Pada penelitian ini, teori diplomasi bilateral digunakan untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh China dalam melakukan upaya-upaya pendekatan diplomasi melalui BRI.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Penting bagi peneliti untuk memahami tentang metodologi penelitian, tidak hanya teknik nya saja (Khotari, 2014). Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian kualitatif, berisi tentang penjelasan dan pemaparan tentang masalah yang diangkat dalam penelitian (Khotari, 2014). Sumber data yang diambil adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari web resmi pemerintah, sementara data sekunder didapat dari berita dan penelitian sebelumnya. Penulis memilih objek konsep dan cara serta strategi China melalui BRI di Vietnam dengan melakukan kerja sama memakai kekuatan letak geografis dan ekonomi di negara-negara yang ada di Vietnam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Teknis analisis data dilakukan secara urut yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

## PEMBAHASAN

### A. *Belt and Road Initiative China*

#### 1. Sejarah Terbentuknya BRI China

*Belt dan Road Initiative China* (BRI) adalah kegiatan ekonomi, diplomatik, dan geopolitik yang beragam yang sebelumnya bernama "*New Silk Road*" kemudian berubah menjadi "*One Belt One Road*". *Belt and Road Initiative China* merupakan salah satu kebijakan luar negeri dan ekonomi Pemerintah China yang paling ambisius. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pengaruh ekonomi China melalui program yang luas dan menyeluruh dalam pembangunan infrastruktur di seluruh negara yang dilewati jalur tersebut (Pratiwi, 2022).

Kebijakan ini dikeluarkan juga mengingat perang dagang antara China dengan Amerika Serikat yang saling memperebutkan pengaruh politik dan ekonomi. BRI memiliki dua rincian yaitu jalur sutra ekonomi darat dan jalur sutra maritim berbasis laut. BRI menghubungkan Asia, Afrika, Oseania, dan Eropa dengan berbagai infrastruktur yang dibangun. China telah mengusahakan dengan mengedepankan sifat kooperatif yang mana akan menguntungkan bersama. Presiden Xi Jinping dalam pidatonya menekankan BRI dalam perdamaian dan kerja sama, keterbukaan dan inklusivitas, saling belajar dan saling menguntungkan (Putri, 2020).

Pola pertumbuhan di China yang sangat padat modal, menghasilkan banyak permasalahan seperti ketimpangan pendapatan, masalah lingkungan, dan lainnya. Sehingga para pembuat kebijakan semakin meningkatkan perhatiannya. China mencoba untuk membuat kebijakan yang mampu membantu banyak orang meningkatkan kemakmuran di atas garis kemiskinan, meskipun segelintir kemiskinan yang sudah mengakar tetap ada. Dibawah kepemimpinan Xi Jinping, China mengajukan inisiatif diplomatik yang sangat signifikan. Salah satunya BRI, yang diusulkan pada kunjungan kenegaraan Jinping ke Kazakhstan dan Indonesia pada September dan Oktober 2013. BRI terdiri dari the *Silk Road Economic Belt* dan the *21st century Maritime Silk Road*. BRI termasuk dalam proyek skala internasional dengan mempromosikan konektivitas dan kerja sama China kepada seluruh dunia (Menegazzi, 2017).

Proyek BRI dibangun melintasi benua Asia, Eropa, dan Afrika dengan menghubungkan perekonomiannya. BRI memiliki 6 koridor ekonomi diantaranya:

- a. Jembatan Tanah Eurasia Baru, melibatkan kereta api ke Eropa melalui Kazakhstan, Rusia, Belarusia, dan Polandia.

- b. Koridor China-Mongolia-Rusia, termasuk kereta api dan jalan yang dihubungkan melalui jembatan.
- c. Koridor China - Asia Tengah – Asia Barat, untuk menghubungkan Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkemenistan, Iran, dan Turki.
- d. Koridor Semenanjung IndoChina-China, termasuk Vietnam Thailand Laos, Kamboja, Myanmar, Malaysia.
- e. Koridor China-Pakistan, menghubungkan Kashgar di Xinjiang dengan pelabuhan Gwadar di Pakistan.
- f. Koridor China-Bangladesh-India-Myanmar, akan bergerak lambat akibat permasalahan keamanan (Pratiwi, 2022).

Zhang Qiyue selaku Konsulat Jenderal China menyatakan jika BRI merupakan inisiatif untuk mengejar kerja sama dan pembangunan, melalui mekanisme bilateral dan multilateral. BRI dibangun atas *prioitas policy coordination, facilities connectivity, unimpeded trade, financial integration, strengthening inter-community bond*. Melalui BRI, China memberikan perubahan signifikan dalam pertumbuhan negara dan realokasi kegiatan ekonomi di dunia. Termasuk dalam perdagangan antar negara dan tenaga kerja dengan biaya lebih rendah. Adanya perbaikan infrastruktur dan transportasi juga bisa berdampak positif pada pembangunan melalui efek pemerataan jalan, lapangan pekerjaan, memotong biaya transportasi dan perdagangan. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur akan berdampak positif bagi peningkatan sumber daya manusia (Maharani, 2022).

Proyek BRI didanai secara multilateral seperti *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB), *Silk Road Fund* (SRF), *the Brazil, Russia, India, China, and South Africa* (BRICS), *the European Bank for Reconstruction Development* (EBRD) dan lembaga swasta sehingga pembangunan berjalan secara parallel. Sebanyak 65 negara bergabung dalam proyek BRI, termasuk Vietnam. Sisi positif dari AIIB jika dibandingkan dengan Lembaga keuangan internasional lain adalah kesediaan AIIB untuk membiayai infrastruktur bagi negara berpenghasilan rendah, mendatangkan keterlibatan dari sektor swasta dalam proyek, serta China meyakini jika AIIB dapat meminimalkan utang publik negara (Hiep, 2018).

BRI menjadi sangat penting bagi China untuk menopang perekonomian. Sejak krisis keuangan global yang terjadi pada periode 2007-2008, perekonomian dunia memasuki fase "*new mediocre*". China mengalami perlambatan ekonomi dalam negeri dan memutuskan untuk mendorong terjadinya reformasi domestik. Pertumbuhan PDB pada negara menurun menjadi kurang dari 7%. China pada saat itu mengalami penderitaan akibat melonjaknya biaya tenaga kerja, sumber daya manusia yang memasuki usia pensiun, dan kelebihan produksi di beberapa industri seperti baja (Anshori, 2018).

China mempercayai jika kelebihan produksi di beberapa industri terjadi akibat permintaan global yang menurun dan mengalami tekanan akibat krisis keuangan global. Sehingga China mencari cara untuk memulihkan dan menjaga ledakan ekonomi agar tetap hidup dengan China melakukan penguatan hubungan dengan negara lain untuk kepentingan bersama, serta memberikan ruang untuk terjadinya peningkatan ekonomi dan transisi model pembangunan China. China secara aktif melakukan eksplorasi mengenai

kerja sama dengan negara lain, lalu membangun model kerja sama *win-win*. BRI hadir untuk mewujudkan tujuan tersebut (Menegazzi, 2017).

BRI juga dapat menjadi pilar kebijakan "*Go West*" bagi China, yang sebelumnya dianggap sebagai upaya dalam negeri guna mengatasi permasalahan kesenjangan pembangunan di pesisir China dan dataran Barat China termasuk Xinjiang, Ningxia, dan Qinghai. Bantuan yang diberikan berupa keuangan, proyek bisnis, dan mengirim sumber daya manusia yang lebih maju. Saat ini, China telah menyadari potensi besar hubungannya dengan negara-negara tetangga. Banyak perusahaan China dan Pemerintah Daerah yang optimis mengenai proyek BRI, dan tertarik untuk memanfaatkan peluang besar yang ditawarkan dalam meningkatkan keterbukaan ekonomi (Hiep, 2018).

China turut menghadapi tantangan keamanan energi melalui BRI. Peningkatan kelas pada masyarakat membuat adanya permintaan tambahan kebutuhan energi dan menjadi hal kritis bagi keamanan nasional. Jika China tidak mengambil langkah pengurangan penggunaan energi, maka dapat terlihat bahwa China akan ketergantungan pada impor minyak bumi di tahun 2030. China perlu mengamankan akses ke energi, dengan mengembangkan pasar baru sehingga nilai ekspor barang dan jasa meningkat untuk memakmurkan masyarakat China dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Adanya BRI membantu mengkonsolidasikan status China sebagai salah satu negara dengan perekonomian yang terkuat. China tergolong energik dalam meningkatkan hubungan dengan negara lain, dengan melakukan pendekatan yang halus dan visioner. China selalu berusaha menjadi negara yang menjembatani antara negara maju dan negara berkembang dalam memaksimalkan strategis ketahanan, serta dalam merespon terjadinya perubahan baru pada perekonomian internasional (Pratiwi, 2022).

BRI yang diinisiasi China merupakan salah satu bentuk geoekonomi yang digalakkan oleh Negara China. Geoekonomi merupakan salah satu penggunaan instrument ekonomi dengan tujuan untuk mencapai kepentingan geopolitik suatu negara terhadap negara atau wilayah lain. Hal ini termasuk juga di dalamnya mencakup kebijakan bantuan pinjaman dana, kebijakan perdagangan, embargo ekonomi, dan sanksi ekonomi. Kerja sama ekonomi BRI dipercayai China dapat membantu mengatasi penyebab ketidakstabilan ekonomi dan mengurangi ketegangan pada negara tetangga. Di bawah kepemimpinan Jinping, China mengadopsi strategi besar baru yang berpusat pada konektivitas baik secara fisik maupun konseptual. Hal ini memerlukan reformasi dalam negeri yang berani untuk mendapatkan kembali momentum ekonomi dengan merombak diplomasi China.

## **B. Dinamika Kerja Sama China dan Vietnam**

### **1. Sejarah Kerja Sama China dan Vietnam**

China dan Vietnam merupakan dua negara yang sama-sama berada di wilayah Asia. Secara geografis, sebelah utara Vietnam berbatasan langsung dengan China. Hubungan bilateral antara China dan Vietnam sudah terjalin sejak era Dinasti Han, ketika Vietnam diinvasi untuk pertama kali pada 111 sebelum Masehi (SM). Hal ini membuat dominasi China kuat di Vietnam. Perlawanan terhadap dominasi di China sempat terjadi dengan dipimpin oleh Trung Trac dan Trung Nhi (Wood, 2015: 34). Dominasi China berakhir setelah Ngo Quyein memenangkan pertempuran Bach Dang 938 Masehi (Hiep, 2018).

Dominasi China memiliki pengaruh besar terhadap budaya dan Pemerintahan Vietnam. Kedua negara ini memiliki banyak kesamaan, seperti ideologi marxisme dan

anti-kolonialisme. Vietnam menjadi salah satu negara dengan ideologi komunis di Asia Tenggara. Vietnam menganut sistem communist party of Vietnam (CPV). Sistem satu partai ini membuat tidak adanya pembatas antara partai politik, pembuat kebijakan, dan pemerintah sehingga sistem checks and balances tidak berjalan efektif (Iriyanto, 2024).

Vietnam berhasil meraih kemerdekaan dari Barat. Pada 1950, China menjadi negara pertama yang mengakui Republik Demokratik Vietnam. Pertumbuhan komunisme di Vietnam, membuat hubungan kedua negara berjalan dengan baik. Pasca kemenangan atas Perancis 1954, Vietnam terbagi menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Sehingga pada 1975, terjadi Perang Vietnam. Vietnam Selatan dibantu oleh Amerika Serikat (AS) guna mencegah penyebaran komunisme dan Vietnam Utara dibantu oleh China (Putri, 2020).

Vietnam Selatan dan Vietnam Utara memutuskan untuk melakukan reunifikasi menjadi negara komunis yang utuh. Pasca Reunifikasi, kebijakan Vietnam berfokus pada rekonstruksi akibat dari perang. CPV mendirikan pemerintahan baru, lalu terjadi reformasi sosial dan politik. CPV mengeluarkan five years master plan atau rencana kerja 5 tahun, diantaranya merubah nama Republik Demokrasi Vietnam menjadi Republik Sosialis Vietnam, perpindahan produksi skala kecil ke besar yang berfokus pada agrikultur dan industri (Pratiwi, 2022).

Dampak dari reunifikasi Vietnam ternyata tidak sesuai. Pemerintah Vietnam sulit dalam beradaptasi dan menerapkan kebijakan ekonomi dan politik sosialis di Vietnam Selatan. Para petani dan perusahaan dipaksa untuk memberikan lahannya pada Pemerintah Vietnam, tetapi banyak yang menolak. Sehingga terjadi penurunan ekonomi, kelaparan, dan malnutrisi. Kegagalan ini mengharuskan Vietnam untuk mencari bantuan dana dari negara sosialis lainnya.

Pada 1979, Vietnam menginvasi Kamboja dengan didukung penuh oleh Uni Soviet, dan mendapat kecaman dari dunia internasional. Invasi dilakukan guna menghentikan konflik perbatasan dan menghapus bekas kekuasaan China. Vietnam mendapatkan sanksi berupa embargo ekonomi, isolasi, dan kritik dari negara Barat dan sekutunya. Hubungan diplomasi Vietnam dengan banyak negara di dunia semakin buruk, ditambah pada 1983 Uni Soviet mengalami kemunduran dan ketidakstabilan ekonomi-politik di Eropa, berujung pada pemberhentian bantuan kepada Vietnam (Friedrichs, 2017).

Dampak dari embargo, membuat tidak ada investasi yang masuk ke Vietnam sehingga semakin memperburuk kondisi perekonomian. Image Vietnam buruk di mata organisasi internasional seperti PBB, IMF, dan lainnya. Mahalnya biaya perang, dan proses rekonstruksi akibat perang yang belum sepenuhnya rampung membuat terjadinya hiperinflasi dan defisit anggaran bagi Vietnam. Periode ini menjadi momen bersejarah bagi Vietnam.

Pada 1986, CPV memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan China dengan menyatukan ekonomi dan kebijakan luar negerinya. Vietnam menarik tentaranya dari Kamboja dan menandatangani Perjanjian Perdamaian 1991. Pertemuan resmi normalisasi hubungan dilakukan pada November 1991. Vietnam melakukan reformasi ekonomi dari sistem ekonomi terpusat menjadi multisektor pasar ekonomi,

dengan tujuan mempercepat pertumbuhan dan mengangkat perekonomian Vietnam (Menegazzi, 2017).

Vietnam mengeluarkan kebijakan Doi Moi pada kongres partai ke-6. Doi Moi bertujuan agar ekonomi Vietnam kembali stabil dan lebih terbuka. Doi Moi berisikan pembangunan dan modifikasi ekonomi, mencakup liberalisasi harga, devaluasi dan penyatuan mata uang, reformasi agrikultur, dan lainnya. Ini dilakukan untuk mengendalikan hiperinflasi. Selama tahun 1990-an, Vietnam berhasil mempertahankan hubungan baik dengan China.

Hubungan kerja sama menjadi penting bagi Vietnam untuk menstabilkan dan membangun negaranya. Doi Moi berhasil mendapat respon positif dari dunia internasional, serta meningkatkan dan memperbaiki hubungan dengan negara lain. Misalnya Jepang memberikan bantuan pembangunan melalui Official Development Assistance (ODA), Vietnam aktif melakukan hubungan normalisasi dengan AS berujung pada pemberhentian embargo sehingga Vietnam dapat berpartisipasi dalam Bilateral Trade Agreement (Hiep, 2018).

Hubungan China dan Vietnam kembali menegang pada Desember 2007 saat meningkatnya tensi di Laut China Selatan. Ketegangan terjadi ketika China memutuskan membangun kota Sansha dan bertanggungjawab atas pulau yang disengketakan di Laut China Selatan, yakni Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Nguyen Tan Dung, selaku Perdana Menteri menekankan akan mengadakan diskusi resmi mengenai kedaulatan Vietnam atas kepulauan tersebut dari klaim China.

Pada 2008, Hubungan bilateral China dan Vietnam kembali meningkat ke arah yang lebih strategis melalui industri bauksit, aluminium, dan pertambangan mineral. Di sisi lain, persoalan mengenai sengketa Laut China Selatan tetap tidak bisa diganggu gugat. Vietnam juga membuat resolusi mengenai wilayah maritim yang perlu dikembangkan guna memiliki keunggulan komparatif sehingga dapat membangun sistem kelautan yang kuat, serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam kerja sama internasional (Putri, 2020).

China dengan konsep harmonious world, mencoba untuk meningkatkan pengaruhnya melalui integrasi ekonomi, dan pembangunan kawasan Mekong, Pan-Beibu Gulf, dukungan terhadap ASEAN, dan organisasi lain selama menguntungkan bagi China. Perekonomian dan sengketa Laut China Selatan membuat pemimpin Vietnam berada dalam posisi sulit. Nguyen Tan Dung harus menghadapi tingkat korupsi tinggi, hubungan kerja sama dengan China dan persaingan dalam partai di Vietnam. Hubungan China dan Vietnam semakin rumit dikarenakan terdapat sentimen anti-China terkait konflik Laut China Selatan. Pemerintah Vietnam bahkan harus meleraikan sendiri demonstrasi di Hanoi dan HoChi karena Pemerintah China tidak suka akan situasi tersebut.

## **2. Upaya Diplomasi Bilateral yang Dilakukan oleh China melalui BRI untuk Memengaruhi Geoekonomi Vietnam**

Presiden Xi Jinping menyatakan jika BRI menjadi jalan untuk menuju keuntungan bersama dengan hasil saling menuntungkan dan akan mendorong semangat perdamaian, kerja sama, keterbukaan, dan inklusivitas (Dunford, 2019:10). China dalam kerja sama BRI lebih menekankan pada peluang baru dan manfaat bersama. Sedangkan Vietnam, lebih menekankan pada kerja sama yang didasarkan pembangunan berkelanjutan, manfaat, keefektifan, dan inklusivitas.

BRI menjadi proyek penting bagi Vietnam untuk mendanai Pembangunan infrastruktur negara. Pada 25 Desember 2015, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) resmi didirikan oleh China. AIIB berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam ekonomi global. Dengan adanya AIIB, turut menandakan jika China mampu untuk mengelola permasalahan ekonomi dan pembangunan global (Menegazzi, 2017).

AIIB dalam proyek BRI akan berguna sebagai lembaga pembiayaan. Vietnam menjadi negara prioritas yang ditargetkan untuk mengintegrasikan ekonominya melalui investasi infrastruktur. China telah memberikan dukungan keuangan sehingga Vietnam dapat memperoleh keuntungan. Misalnya proyek pembangunan jalan raya, proyek kereta api, pelabuhan laut, bandara, jembatan, pengembangan pariwisata, dan pertukaran pelajar.

Pada konferensi tingkat internasional di Hanoi 2017, Pemerintah Vietnam diingatkan mengenai partisipasi Vietnam dalam BRI dapat menyebabkan "ketergantungan berlebih" pada China, serta menyoroti beberapa permasalahan lain. Misalnya hutang publik, perlindungan atas hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi, catatan kerusakan lingkungan oleh perusahaan China, tidak transparansi, dan cara penyelesaian saat berselisih. Pemerintah Vietnam dianjurkan untuk melihat lebih dari sekedar keuntungan ekonomi ketika mempertimbangkan partisipasi dalam BRI (Iriyanto, 2024).

China akan menggunakan AIIB sebagai jalur komunikasi baru dengan Vietnam dalam mengupayakan kerja sama bilateral. AIIB menjadi penting dalam kebijakan multilateralisasi, diversifikasi, dan integrasi Vietnam. AIIB juga sudah menggunakan standar internasional dan transparan dalam hal pinjaman sehingga diklaim tidak akan mempengaruhi kondisi politik negara.

Lebih dari 30 tahun revolusi, Vietnam memiliki beberapa masalah krusial, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak efisien, korupsi, inflasi tinggi, defisit perdagangan, dan defisit fiskal yang menghambat jadwal pembangunan. Permasalahan ini menimbulkan potensi risiko ekonomi jangka panjang. Sehingga Vietnam bergantung pada investasi asing dan pinjaman China. Berimbas pada utang Vietnam terus meningkat (Kurniawan, 2021).

Pembangunan infrastruktur Vietnam termasuk dalam skala besar, tetapi memiliki daya modal yang terbatas. Melalui AIIB, Vietnam menarik lebih banyak investasi, serta mendapat daya tarik bantuan internasional serta memperkuat posisi politik Vietnam di dunia internasional. Kebutuhan Vietnam secara aktif mencari sumber pendanaan berbeda untuk menutupi kesenjangan antara tren kebutuhan investasi dan tren investasi saat ini.

Meski China menunjukkan ketertarikan untuk menandatangani proyek pembangunan infrastruktur tersebut, tetapi Vietnam tidak mungkin menjadikan pinjaman China sebagai prioritas utama. Pinjaman China bukanlah suatu hal yang "murah" dan "mudah". Tingkat bunga pinjaman China tergolong tinggi, ditambah adanya pengalaman buruk Vietnam dalam menggunakan jasa kontraktor dan bantuan alat berbasis teknologi tinggi dari China (Hiep, 2018).

Hal ini yang dikhawatirkan oleh Vietnam. AIIB dianggap sebagai pancingan yang bisa berdampak negatif pada perekonomian dan keamanan nasional Vietnam. Vietnam memiliki banyak proyek pembangunan infrastruktur dengan China sebagai sumber utama. Vietnam memiliki proyek Pembangunan infrastruktur yang bekerja sama dengan kontraktor asing, termasuk China. Menghadapi masalah ancaman China, Vietnam ingin mengurangi ketergantungan ekonomi dan memperluas kemitraannya menjadi lebih besar.

Selain itu, terdapat alternatif lain untuk pembiayaan Pembangunan infrastruktur di Vietnam yakni Official Development Assistance (ODA) dan lembaga keuangan internasional. Tawaran pinjaman ini menjadi lebih menarik karena persyaratannya jauh lebih sedikit. Meski dalam ketentuan ODA mengharuskan menggunakan layanan dan peralatan dari Jepang, tetapi kontraktor dan bantuan alat berbasis teknologi Jepang dianggap lebih dapat dipercaya oleh publik Vietnam (Kurniawan, 2021).

Defisit anggaran Vietnam mungkin akan berlanjut sehingga dapat menyebabkan investasi yang didanai publik dalam pembangunan infrastruktur menurun. Persepsi Vietnam terhadap BRI dan AIIB akan bergantung pada pinjaman serta kredibilitas dan peralatan dari China. Vietnam akan mengamati kinerja proyek yang didanai China di dalam negeri, serta proyek BRI di negara lain. Hal ini guna memastikan pinjaman jangka panjang BRI di Vietnam.

Hubungan diplomatik China dan Vietnam berjalan secara fluktuatif karena adanya permasalahan mengenai sengketa Laut China Selatan, serta sejarah Perang China dan Vietnam 1979. Persepsi politik Vietnam, masih kental dipengaruhi dengan sentimen ekspansionisme China. Tidak sedikit penduduk Vietnam yang meyakini jika BRI merupakan alat yang digunakan China untuk memperluas pengaruh dan kekuatan hegemoninya. Dalam sejarahnya, ribuan tahun China berhasil untuk mendominasi Vietnam. Vietnam selalu berusaha menghadapi ancaman resiko dari rezim China (Pratiwi, 2022).

Meski kedua negara memiliki ideologi yang sama, para pemimpin Vietnam masih mempercayai jika China selalu memiliki cara untuk menyalahgunakan dan memanipulasi Vietnam hanya demi kepentingan negaranya. Misalnya saat Konferensi Jenewa 1954 dan Deklarasi AS - China 1972, Vietnam merasa citra negaranya telah "dijual" oleh China. Hal ini membuat keputusan hubungan diplomatik dan pecahnya perang China dan Vietnam 1979 (Golley, 2016).

Pada normalisasi hubungan tahun 1990-an, Perdana Menteri Vietnam Pham Van Dong menyatakan jika China masih sama seperti China pada ribuan tahun lalu, sehingga Vietnam tidak bisa percaya sepenuhnya. Fakta lainnya, sebagian besar orang Vietnam berpandangan negatif dengan China. Menurut Pew Research Center, ada 80% penduduk Vietnam yang menganggap China sebagai ancaman (Bocock, 2017).

Pada Mei 2014, orang-orang Vietnam kembali membangkitkan sentiment anti-China yang kuat, melakukan protes dan pemberontakan dengan menjunjung nasionalisme tinggi. Pada dasarnya, hubungan bilateral China dan Vietnam adalah elite driven dengan melakukan pembatasan people-to-people contact yang berimbas pada mudah untuk diprovokasi oleh nasionalisme sendiri karena kurangnya komunikasi.

Hadirnya inisiatif BRI ketika sengketa Laut China Selatan meningkat, membuat orang Vietnam memiliki alasan tersendiri untuk meragukan niat China. Meningkatnya nasionalisme di Vietnam dan sentimen anti-China akan memicu konfrontasi dan konflik yang berbahaya bagi pengembangan perdagangan dan integrasi ekonomi. Tetapi hubungan diplomatic dan kerja sama bilateral yang telah terjalin lama antara China dan Vietnam, membuat konflik politik yang terjadi bisa dihindari melalui negosiasi dan tidak mengganggu sektor pendidikan, budaya, dan ekonomi berkat adanya Kerja sama bilateral di berbagai bidang sehingga membantu dalam membuat hubungan kedua negara lebih stabil.

Xiaoyu Pu, Asisten Professor dari Universitas Nevada,) meyakini bahwa China akan mengambil peran sebagai '*the spoiler*' karena tidak merasa puas dengan status rendah (*subordinate status*) dalam tatanan dunia saat ini, atau dengan kata lain, China ingin mendelegitimasi tatanan internasional yang ada. Selanjutnya mengatakan, "*through the*

*implementation of BRI/OBOR, China would attempt to create a China-centered world order that will replace the existing order.*” Pernyataan ini sangat jelas bahwa China sedang berusaha untuk menggantikan tatanan dunia lewat implementasi BRI. Hal senada juga di katakan oleh Professor Xiang Lanxin (Belt & Road News, 2019) dari *the China National Institute for SCO International Exchange and Judicial Cooperation*. Ia mendefinisikan BRI sebagai “*an avenue to a ‘post-Westphalian world’, in a sense of a true 21st century geo-economic integration of Eurasia acted out by Asian nations*”. Definisi ini jelas menyiratkan bahwa BRI adalah sebuah instrumen masa depan ketika sistem negara-bangsa (Westphalia) berakhir, maka akan digantikan oleh sistem (tianxia) yang dikontrol oleh China atau negara-negara Asia pada umumnya. Melalui adanya BRI, China menunjukkan tekad yang bulat untuk dapat memberikan pengaruh geoekonomi terhadap negara-negara yang letaknya berdekatan dengan Negara China. Salah satu perwujudannya adalah terhadap hubungan bilateral China dengan Vietnam.

### **C. Pengaruh Implementasi Proyek BRI yang Dilakukan oleh China terhadap Kondisi Ekonomi Vietnam**

Saat Saat BRI resmi diumumkan pada 13 Oktober 2013, Li Keqiang yang menjabat sebagai Perdana Menteri China telah melakukan kunjungan ke Vietnam, meski belum membahas mengenai BRI. Pada 2014, kedua negara tidak melakukan kunjungan dikarenakan sengketa Laut China Selatan. China secara aktif mulai mengajukan usulan BRI ke Vietnam sejak April 2015. Nguyen Phu Trong selaku Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, menyambut baik partisipasi Vietnam.

Pertemuan tersebut menjadi pilar awal BRI di Vietnam, yang diikuti dengan kehadiran Presiden Vietnam Tran Dai Quang pada forum belt and road for international cooperation di China. Keterlibatan Hanoi dalam BRI diharapkan dapat membantu Vietnam mewujudkan pembangunan negara. Pada 2016, keduanya secara aktif lebih mempromosikan dan membahas lebih lanjut terkait proyek kolaboratif dalam BRI (Hiep, 2018).

Vietnam juga memerlukan banyak modal untuk pengembangan transportasi ke luar negeri. Pada Mei 2017, kedua negara mencapai kesepakatan dan menandatangani MoU kerja sama kerangka kerja BRI, sekaligus mengumumkan prioritas seperti koordinasi kebijakan, konektivitas infrastruktur, perdagangan, keuangan, dan sumber daya manusia. Penandatanganan MoU ini sebagai bukti adanya pengaruh yang diberikan oleh China melalui BRI terhadap geoekonomi Vietnam. Pengaruh BRI China terhadap geoekonomi Vietnam dapat terlihat dari adanya kerja sama bilateral yang terjalin baik antara kedua negara. Adapun proyek Vietnam dalam BRI diantaranya ada Taman Industrial Long Jiang, Pembangkit Listrik Tenaga Batubara, dan koneksi jaringan (Iriyanto, 2024).

Untuk melihat keberhasilan BRI dalam memengaruhi kondisi geoekonomi Vietnam, dapat dilihat melalui *Logistics Performance Index* (LPI). LPI adalah media tolak ukur untuk membantu negara mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam kinerja negara, dan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja negara. LPI Vietnam terus meningkat setelah bergabung dengan BRI.

#### **1. Pembangunan Vietnam Long Jiang Industrial Park (LJIP)**

Zona Ekonomi Khusus merupakan kawasan yang dalam Undang-Undang perdagangan China berbeda mengenai tarif, kuota, bea dari negara lain. Zona ekonomi ini

digunakan untuk memperkuat daya saing kota, daerah, dan negaranya. Terdapat 5 jenis kawasan ekonomi yang menjadi bagian dari *Chinese oversease economic and trade cooperation zone* (COCZs), yakni *industrial park*, *special economic zone* (SEZ), *technology park*, dan *inovation district*. Kawasan ekonomi dimanfaatkan untuk menarik lebih banyak *Foreign Direct Investment* (FDI) dan mendorong pembangunan ekonomi lokal.

Long Jiang Industrial Park (LJIP) adalah salah satu proyek Kerja sama ekonomi China dan Vietnam. LJIP memiliki 2 tahap pembangunan, pada November 2007 dan 2015. LJIP berada di Komune Tan Lap 1, Distrik Tan Phuoc, provinsi Tien Giang. Jumlah investasi yang diberikan BRI pada LJIP mencapai 40 miliar USD. LJIP memiliki luas sebesar 600 hektar tanah, dengan 540 hektar terdiri atas kawasan industri dan 60 hektar untuk perumahan serta area layanan. Meliputi lahan untuk pabrik, proyek eknis, jalan lalu lintas, pohon dan danau, dermaga, parkir, dan pusat administrasi (Pratiwi, 2022).

LJIP memiliki fasilitas untuk menunjang keberhasilan investasi manufaktur, seperti memiliki akses transportasi yang nyaman dimana LJIP terletak sepanjang jalan raya Ho Chi Minh-Trung Luong dengan jarak 50 km ke pelabuhan Saigon, dan 35 km ke pelabuhan Bourbon), adanya kebijakan pajak yang menarik dimana 4 tahu pertama pembebasan pajak dan hanya dikenakan 10% sejak memiliki pendapatan 9 tahun berikutnya akan mendapat diskon pajak 50%, sumber tenaga kerja lokal yang berlimpah, dan dilengkapi dengan infrastruktur seperti pasokan listrik dan air, drainase badai, instalasi pengolahan limbah, dan layanan pendukung guna memastikan perkembangan yang stabil bagi investor (Golley, 2016).

Pasca diperkenalkannya BRI pada 2015, investasi China ke Vietnam meningkat. Vietnam diuntungkan dengan adanya pembangunan infrastruktur menunjang perekonomian. Pembangunan Long Jiang Industrial Park (LJIP) telah menciptakan 30.000 lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. LJIP terdiri atas gabungan industri garmen, industri elektronik, industri kimia, restoran, dan took yang secara tidak langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat. Selain itu, terdapat pula perusahaan-perusahaan dari China, Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Vietnam yang memiliki kesempatan mengambil keuntungan (Hiep, 2018).

Pada 2018, LJIP telah menerima investasi dari BRI senilai 1,5 miliar USD dan menciptakan PDB senilai 1.088 juta USD dengan tingkat Pembangunan 72,53%. Komoditas barang yang menjadi unggulan dalam LJIP mencakup produk bahan kimia, biomedis, manufaktur, elektromekanis, hasil pertanian, dan hasil kehutanan. Yu Suo selaku Presidem LJIP mengatakan jika perlindungan lingkungan menjadi prioritas utama dan tanggung jawab social Perusahaan (Putri, 2020).

Secara umum, LJIP merupakan salah satu proyek yang menjadi focus investasi China di Vietnam dibawah BRI. China dan Vietnam saling diuntungkan dengan adanya pembangunan taman industri ini. Bagi China, LJIP telah memberi keuntungan karena China telah mengkonfirmasi terdapat 20 lebih perusahaan China yang membangun pabrik di Vietnam. Vietnam mendapatkan fasilitas penunjang bagi pembangunan ekonominya seperti dermaga yang menjadi pusat keluar masuk barang, memberikan peluang kerja, dan meningkatkan PDB serta pembangunan.

## 2. Sektor Perdagangan

Hubungan bilateral China dan Vietnam, telah menciptakan peningkatan terhadap perdagangan. Pada periode 2015-2018 terdapat peningkatan signifikan sejak diperkenalkannya BRI pada tahun 2013 dan kedua negara telah menyepakati kerja sama

dalam BRI pada tahun 2015. Komoditas ekspor utama dalam perdagangan Vietnam ke China adalah mesin dan elektronik (komputer, telepon, komponen elektronik), produk pertanian (hasil laut, beras, buah dan sayur, kopi), baja, dan produk manufaktur (tekstil dan garmen, alas kaki). Tren perdagangan kedua negara cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, sehingga China berhasil menjadi top importer Vietnam pada periode 2015-2018, dan Vietnam berhasil masuk top ekspor partner bagi China pada periode 2015-2018 (Putri, 2020).

Pada komoditi pertanian, sejak 2015-2018 terdapat 3 ekspor pertanian terbesar Vietnam ke China, yakni beras, kopi, serta buah dan sayur. Pada 2017 Vietnam berada di puncak tertinggi dalam omset hasil ekspor beras senilai lebih dari 1 miliar USD ke China, dan berhasil menguasai pangsa ekspor beras China sebesar 60%. Pada 2018, Vietnam mengekspor 1,24 juta ton atau senilai dengan 630 juta USD. Meski mengalami penurunan akibat adanya peraturan China mengenai ekspor yang diperketat, tetapi harga rata-rata beras di Vietnam naik menjadi 501-508 USD/ton naik sekitar 10-15% dibandingkan tahun sebelumnya (Kurniawan, 2021).

Pada 2018, ekspor kopi Vietnam ke China mencapai 1836 kg (M.-N Nguyen, 2022) atau senilai lebih dari 109,5 juta USD. Ekspor buah dan sayur Vietnam, bergantung pada China. Omset Vietnam pada tahun 2016, senilai 1,7 miliar USD dan meningkat 80% pada 2017. Jenis buah yang sering diekspor diantaranya buah naga, semangka, lengkeng, pisang, manga, rambutan, dan manggis (Maharani, 2022).

Pada 2018, China mengirimkan buah dan sayur ekspor seperti wortel, kubis, kentang, delima, pir, plum, dan anggur. Untuk buah, China mengekspor anggur sebanyak 67,9 juta kg atau senilai 153,7 juta USD dan pir sebanyak 66,6 juta kg atau senilai 109,1 juta USD. Kacang-kacangan, pisang, kurma, manggis, manga, alpukat, nanas, jeruk, melon, pepaya, semangka, dan buah berries lainnya mencapai 81,9 juta kg atau senilai 131,3 juta USD. Naik 18% dari tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 69,1 juta kg atau senilai 125 juta USD (Putri, 2020).

Untuk sektor garmen dan tekstil, BRI telah memperkuat pasokan industri tekstil dan garmen Vietnam. China berperan penting dalam industri tekstil dengan memproduksi kapas, benang, kain, aksesoris, dan lainnya. Pada 2018 China mengekspor benang katun mencapai 56,6 ribu kg senilai 3,4 juta USD, naik sekitar 170 kg dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, Vietnam mengekspor kain sebanyak 3,03 juta kg senilai 26,6 juta USD pada 2017. Naik sekitar 1 kg lebih dari tahun sebelumnya (Pratiwi, 2022).

Pada sektor mesin dan elektronik, Vietnam mengimpor 33% peralatan mesin dan komponen listrik dari China. Pada 2017, Vietnam mengekspor cip mencapai 11,2 ribu kg senilai 2,77 juta USD dan peralatan listrik senilai 3,06 juta USD. Di tahun yang sama, China mengekspor perangkat telepon dan perangkat lain sebanyak 23,4 juta kg atau senilai 6,52 miliar USD, lalu naik menjadi 25,4 juta kg atau senilai 6,59 miliar USD (Iriyanto, 2024).

Dari data 2016-2018, ekspor meningkat terutama pada 2017. Terlihat ekspor Vietnam ke China secara keseluruhan mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun, munculnya BRI menjadi salah satu faktor peningkatan yang terjadi. Di lain sisi, China juga mendapat keuntungan dari BRI berupa ekspor yang mengalami peningkatan ke Vietnam.

Jika melihat perdagangan China dan Vietnam, keduanya memiliki produk keunggulan tersendiri. Dengan adanya keunggulan masing-masing negara maka akan menimbulkan ketergantungan. China mengimpor produk pertanian guna memenuhi kebutuhannya, dan Vietnam mengimpor mesin serta elektronik karena memerlukannya guna mendukung perkembangan ekonomi yang pesat.

### 3. Sektor Energi

Sektor energi menjadi bagian utama dari kerja sama China dan Vietnam dalam BRI karena penyediaan energi telah menjadi salah satu tujuan dalam sustainable development goals (SDGs). Vietnam mendirikan Vietnam Electricity (EVN) pada 1995 yang bertanggung jawab atas distribusi listrik, dan membantu meningkatkan akses rumah tangga ke jaringan listrik nasional.

Program elektrifikasi Vietnam termasuk salah satu yang sukses dalam menyediakan akses energi. Pada 2014, elektrifikasi yang digunakan untuk penerangan di Vietnam sudah sangat luas, mencakup 96,9% di pedesaan dan 99,8% di perkotaan. Sebesar 3% masyarakat Vietnam yang menyatakan ketidakcukupan penggunaan listrik guna memenuhi kebutuhan. Pada 2018, Vietnam mengimpor listrik kurang dari 3% ke China (Kurniawan, 2021).

Adanya keterbatasan dalam penyediaan energi listrik, membuat China menawarkan investasi di sektor ketenagalistrikan guna meningkatkan konektivitas daya di dalam batas-batas negara. Pembangkit listrik bertenaga batu bara menjadi bagian penting dari BRI, dengan China sebagai pengeksport dan pemberi dana utama. Proyek energi BRI didukung oleh Export-Import Bank of China (CHEXIM) dan China Development Bank (CDB) (Putri, 2020).

China telah menginvestasikan listrik pada pembangkit listrik tenaga batu bara. Batu bara berperan penting untuk membangkitkan 38,12% listrik di Vietnam. Total investasi yang diberikan China untuk mengembangkan beberapa proyek di atas mencapai 56,63 miliar USD, dengan total kapasitas listrik sebesar 5400 MW. China menjadi salah satu investor utama bagi Vietnam pada sektor energi selain Jepang dan Korea (Hiep, 2018).

Kerja sama ekonomi sektor energi memberikan Vietnam keuntungan berupa ketersediaan listrik yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sehingga akses pada penggunaan listrik lebih luas. Menurut data World Bank, akses masyarakat Vietnam terhadap jaringan listrik sudah mencapai 100% atau sekitar lebih dari 80 juta penduduk pada 2018. Investasi sektor energi listrik juga menguntungkan bagi China, karena China menjadi salah satu investor terbesar bagi Vietnam dalam pengembangan energi. BRI membawa peluang bagi perusahaan China untuk mengeksport peralatan tenaga surya senilai 8 miliar USD (Iriyanto, 2024).

BRI menjadi faktor peningkatan pada sektor energi di Vietnam melalui pembangunan beberapa pembangkit listrik. Kerja sama sektor energi China dan Vietnam, bertujuan untuk meringankan beban terkait kapasitas pembangkit listrik, menuntaskan kemiskinan, mengurangi harga energi, mengurangi kekurangan pasokan, dan mendorong pengembangan sektor energi. Di lain sisi, China juga mendapat keuntungan dari BRI dengan menjadi salah satu investor utama ke Vietnam. Pembangunan energi berperan penting guna meningkatkan kehidupan masyarakat Vietnam, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Meski begitu, pembangunan pembangkit listrik berdampak pada masalah lingkungan. Dalam BRI, diperlukan inisiatif untuk dekarbonisasi dan Tindakan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan. Dibandingkan dengan model berbasis karbon, ada

baiknya BRI diarahkan lebih dekat dengan energi alternatif. Misalnya energi matahari. Dalam bidang energi, China menjadi salah satu investor terbesar bagi Vietnam dalam pengembangan energi.

#### 4. Sektor Pariwisata

China dan Vietnam juga melakukan kerja sama ekonomi pada sektor pariwisata. Dibawah kerja sama BRI, Vietnam dapat mengakses pembangunan dan transportasi, memberi peluang integrasi perdagangan, mempercepat potensi pariwisata, serta untuk memajukan keperluan komersil dan perdagangan. Sangat penting bagi negara untuk memastikan Tingkat dan standar fasilitas dan layanan pariwisata yang memadai, karena sebagai penentu utama pengembangan destinasi (Pratiwi, 2022).

Layanan akomodasi, jasa transportasi, jasa perjalanan wisata, makanan, rekreasi dan atraksi, serta perbelanjaan menjadi elemen penting dalam layanan pariwisata. Vietnam telah mendapatkan keuntungan dari China, Dimana China telah menginvestasikan 868 juta USD untuk pembangunan pelayanan transportasi Hanoi Metro (rute Cat Linh-Ha Dong) (Yunus, 2023).

Pembangunan jalan raya Kunming-Hanoi juga membantu untuk menghilangkan hambatan dalam transportasi, sehingga bisa ditempuh dalam waktu lebih cepat. Proyek ini memberikan peluang bagi produk pertanian dan maritim Vietnam untuk memiliki akses lebih besar ke pelabuhan, dan akan memudahkan perusahaan mengirimkan barang secara internasional. Jalan raya dengan biaya 78,74 miliar yuan diharapkan memberikan keuntungan bagi pariwisata Vietnam Utara dan Yunnan, misalnya ke tempat wisata Ha Long Bay, Sa Pa, Dali, dan Shangri-la (Pratiwi, 2022).

China masih memimpin dalam jumlah pengunjung asing ke Vietnam. Total turis dari China hampir sebanyak 5 juta pengunjung, hampir sepertiga dari total wisatawan internasional yang datang ke Vietnam. Vietnam telah mendapatkan USD 26,75 miliar USD naik 4,75 miliar USD dari sektor pariwisata jika dibandingkan pada 2017. Vietnam telah menjadi tujuan internasional populer dalam pengembangan pariwisata di Asia Tenggara dan 50 negara yang memiliki kemampuan kompetitif dalam pariwisata top dunia (Pratiwi, 2022).

Ledakan industri pariwisata akan membawa manfaat besar seperti resort, hotel, pub, restoran, dan lainnya. Hanoi dan Ho Chi Minh menjadi tujuan wisata terbesar bagi turis China yang ke Vietnam. Turis China biasa memasuki Vietnam melalui jalur darat dengan kereta api atau bus melalui Pelabuhan perbatasan di Provinsi Guangxi-Yunnan China, dan jalur udara melalui bandara internasional Hanoi, Da Nang, Ho Chi Minh (Hiep, 2018).

Keuntungan yang didapatkan China dari kerja sama pariwisata ini adalah adanya kesempatan untuk mempromosikan objek wisata dari kedua negara. Vietnam menjadi negara kedua terbesar penyumbang wisatawan China. Lalu, terdapat banyak peluang bagi perusahaan China untuk berinvestasi pada fasilitas objek wisata seperti hotel, transportasi, restoran dan lainnya. Kerja sama ini juga telah memperkuat hubungan bilateral China dan Vietnam.

BRI menjadi salah satu faktor terjadinya peningkatan jumlah turis ke kedua negara. BRI juga membantu meningkatkan infrastruktur pariwisata dan sistem transportasi, mengembangkan tempat pariwisata untuk meningkatkan tingkat kunjungan turis kedua negara. Dengan adanya BRI, laju jumlah wisatawan yang berkunjung ke negara Vietnam

mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya promosi pariwisata Vietnam yang didorong oleh negara China. Bertambahnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Vietnam, berdampak pula laju pertumbuhan ekonomi yang semakin bertambah dan meningkat.

### KESIMPULAN

Bergabungnya Vietnam dalam BRI, Vietnam memiliki kesempatan untuk meningkatkan jumlah ekspor dengan banyak negara yang menjadi mitra BRI. Vietnam juga telah mendapat investasi berupa peralatan manufaktur guna menghasilkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi. Hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, BRI telah memberikan pengaruh terhadap geoekonomi China dan Vietnam periode 2017-2018. Dimana terdapat kenaikan pada kerjasama sektor perdagangan, energi, dan pariwisata. BRI juga telah memfasilitasi pembangunan taman industri Long Jiang. Sehingga BRI memiliki peran penting dalam kerjasama ekonomi China dan Vietnam.

China telah berhasil membuat Vietnam bergabung sebagai mitra strategis BRI. Melalui kerjasama bilateral yang dilakukan, baik China dan Vietnam telah mendapat keuntungan. Vietnam mendapatkan investor untuk memenuhi pembangunan infrastrukturnya dan China dapat melakukan proyek BRI sesuai yang diinginkan. Sehingga dalam hal ini terdapat perbedaan keuntungan yang didapatkan. BRI telah menunjukkan jika China dan Vietnam saling membutuhkan. China bergantung kepada Vietnam untuk menyukseskan BRI, mempromosikan citra baik China, dan mengefisiensikan arus keluar dan masuk barang khususnya di Asia Tenggara. Vietnam juga bergantung pada China untuk meningkatkan perdagangan dan sebagai partner Pembangunan infrastruktur. Hal inilah yang nantinya dapat melahirkan kerjasama lanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, M. R., Nizmi, Y. E., & Waluyo, T. J. (2021). Analisis Masuknya Belt and Road Initiative China ke Asean dan Identitas yang Dipromosikan China. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9213–9221.
- Anam, S., & Ristiyani, R. (2018). Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) China pada Masa Pemerintahan Xi Jinping. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(2), 217–236. <https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2842.217-236>
- Andika, M. T., & Aisyah, A. N. (2017). Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan? *Juli-Desember 2017, Vol. 2, No. 2*(Indonesian Perspective), 161–179.
- Anggraeni, G. N., Sulistiyanto, & Supandi. (2021). Pemilihan Strategi Geopolitik Dan Geoekonomi Indonesia, China Dan Amerika Serikat Di Kawasan Laut China Selatan. *Ekonomi Pertahanan*, 1–25.
- Anshori, D. (2018). Hegemoni dan Dominasi Bahasa Pejabat dalam Media Massa Pasca Orde Baru: Analisis Wacana Kritis Tentang Idiom Politik di Indonesia. *Jurnal Politik Lokakarya Nasional*.
- Berridge, G. R. (2015). *Diplomacy Theory and Practice*. United Kingdom: Palgrave Macmillan UK.
- Bocock, R. (2017). *Pengantar Komprehensif untuk Memahami Hegemoni*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Djelantik, S. (2016). *Diplomasi antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Friedrichs. (2017). *Kaum Realis, Ide-Ide Dasar dan Sejarah Perkembangannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Golley, J. (2016). *Goeconomic Brief # 1 — Context and Concepts*. Australia: Australian National University Public Policy and Societal Impact Hub.
- Gultom, O. A. (2022). Diplomasi Publik Indonesia dalam Mempromosikan Pariwisata di Thailand Melalui "Wonderful Indonesia". *Skripsi Universitas Komputer Indonesia*.
- Hiep, L. H. (2018). The Belt and Road Initiative in Vietnam: Challenges and Prospects. *ISEAS Perspective Journal*, 1-7.
- Iriyanto, B. D. (2024). Ancaman dari Implementasi Belt and Road Initiative (BRI) China di Vietnam. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Kennedy, D. P. (2022). *Geoekonomi : Ekonomi dan Pertahanan*. Jakarta: Pustaka Madani.
- Kurniawan, Y. (2021). Diplomasi Ekonomi Tiongkok melalui Belt and Road Initiative (BRI) di Asia Tenggara (2013-2018) Studi Kasus: Pembangunan Infrastruktur melalui BRI di Vietnam. *Jurnal FISIP Budi Luhur*.
- Maharani, N. R. (2022). Globalisasi Ekonomi Vietnam dalam Kerangka Pembangunan Belt and Road Initiative. *Jurnal Reformasi*, 27-40.
- Menegazzi, S. (2017). Global Economic Governance between China and the EU : The Case of The Asian Infrastructure Investment Bank. *Asia Europe Journal*.
- Nye, J. (2014). *Soft Power : the Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.
- Perwita, A. A. (2011). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Perwita, D. A. (2020). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pratiwi, D. (2022). Pengaruh Belt and Road Initiative terhadap Kerjasama Ekonomi Tiongkok dan Vietnam Periode 2015-2018. *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Putri, S. (2020). The Maritime Silk Road's Potential Affects on Outer Island Development : The Natuna Island, Indonesia. *Islands Studies Journal*.
- S.L.Roy. (2016). *Diplomacy*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sabah Al-Fedaghi, R. A. (2022). A New Methodology for Process Modeling of Workflows. *Journal of Software Engineering and Applications*.
- Siswanti, E. (2017). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. *Jurnal Translitera*, 11-33.
- Sorensen, R. J. (2014). *Introduction To International Relations*. Oxford: Oxford University Press.
- Trahastadie, S. A. (2019). Kerjasama PT. PAL Indonesia (PERSERO) dengan Damen Schelde Naval Shipbuilding Belanda dalam Bidang Pertahanan untuk Modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan Indonesia (2012-2017). *Skripsi Universitas Komputer Indonesia*.
- Wigell, S. d. (2018). Geo-Economics As Concept and Practice in International Relations. *FIIA Working Paper*.
- Wijaya, R. A. (2019). Pengantar Mengenai Hegemoni dan Hukum: Menyoal Kembali Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 494-511.

Yunus, F. (2023). *Hegemoni : Jejak Bahasa Politik Pasca MoU Helsinki*. Aceh: Bandar Publishing.

**Catatan:**

Penulisan naskah tulisan menggunakan spasi 1.5, dengan jenis huruf *Times New Roman* berukuran 12, dan besar alinea 1.25 cm. Setiap singkatan ditulis dengan huruf (*Italic*) yang disertakan dengan penjelasan akan singkatan tersebut.